

TEMPAT KHUSUS MEROKOK BAKAL DITAMBAH

Langgar KTR, 72 Wisatawan di Malioboro Kena Teguran

YOGYA (KR) - Libur panjang yang bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek turut menjadi sarana edukasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di sepanjang Malioboro. Terbukti selama libur tersebut sebanyak 72 wisatawan dikenai teguran lantaran melanggar KTR.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Sat Pol PP Kota Yogya Yudho Bangun Pamungkas, menjelaskan mayoritas yang melanggar ketentuan KTR di area Malioboro ialah wisatawan dari luar daerah. Totalnya mencapai 64 orang. Sedangkan sisanya yakni delapan orang merupakan pengunjung lokal Yogya serta pelaku yang sehari-hari beraktivitas di Malioboro.

"Kalau wisatawan dari luar daerah bisa dimaklumi karena mungkin belum tahu aturan jika Malioboro ter-

masuk area larangan merokok. Tetapi bagi warga yang sehari-hari berada di Malioboro seharusnya sudah bisa memahami aturan itu karena sosialisasi dan tindakan juga rutin kami lakukan," urainya, Kamis (30/1).

Kendati demikian diakuinya jumlah pelanggaran KTR di kawasan Malioboro jauh berkurang jika dibandingkan momentum liburan tahun lalu. Sebelumnya jumlah pelanggaran bisa mencapai ratusan wisatawan sedangkan saat ini masih di bawah seratus orang. Penurunan jumlah perokok di ruang

publik kawasan Malioboro ditengarai seiring pemahaman akan sanksi yang bakal diterimanya. Hal ini karena pada tahun ini Sat Pol PP akan memberikan sanksi yustisi, sehingga tidak sekadar teguran melainkan diproses ke aparat penegak hukum.

Yudho Bangun Pamungkas menambahkan penerapan sanksi yustisi akan mengacu pada Perda 2/2017 terkait KTR. Di dalamnya diatur sanksi bagi pelanggaran bisa berupa denda maksimal Rp 7,5 juta. Penerapan sanksi yustisi ditargetkan pada semester pertama tahun ini atau maksimal pada Juli mendatang.

"Penetapan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok sudah cukup lama yakni sejak tahun 2020 lalu dari Teteg utara hingga Titik Nol Kilometer. Selama ini kami masih melakukan pendekatan persuasif berupa

sosialisasi dan teguran," tambahnya.

Seiring dengan rencana penerapan sanksi yustisi, tempat khusus merokok di kawasan Malioboro juga bakal ditambah. Selama ini baru ada tiga lokasi yakni di Taman Parkir Abu Bakar Ali, sebelah utara Malioboro Plaza serta lantai tiga Pasar Beringharjo. Tempat khusus merokok yang masih terbatas serta lokasi yang berjauhan antara satu titik ke titik lain juga menjadi keluhan wisatawan ketika aparat Sat Pol PP Kota Yogya melakukan sosialisasi. Oleh karena itu penambahan lokasi khusus merokok menjadi salah satu upaya sebelum tindakan yustisi diterapkan. Dengan begitu harapannya tidak ada alasan bagi pelanggaran yang masih merokok sembarangan.

Terkait titik lokasi tempat khusus merokok, imbuha Yudho Bangun

Pamungkas, tengah dikoordinasikan bersama para pelaku usaha di kawasan Malioboro. Sejauh ini ada 23 titik lokasi yang bisa dijadikan lokasi tempat khusus merokok. Sebagian besar menginduk pada lokasi tempat usaha di kawasan itu.

"Para pelaku usaha mendukung penambahan tempat khusus merokok. Terutama para pelaku di sektor restoran, kafe maupun minimarket, karena itu juga bisa menjadi daya tarik. Misalnya bagi yang ingin merokok di tempat itu berarti dia juga bisa membeli sesuatu di sana," terangnya.

Meski demikian, tempat khusus merokok harus berada di tempat yang terpisah dari tempat nonsmoking. Selain itu juga berada di tempat terbuka serta tidak menyatu dengan titik lalu lintas pengunjung. **(Dhi)-f**

BERTEMU SULTAN HB X

United Kingdom Tawarkan Bantuan Tekan Emisi Karbon

YOGYA (KR) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan dari Tim United Kingdom (UK) Partnering for Accelerated Climate Transitions (PACT) di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Kamis (30/1). Dalam kunjungan tersebut pemerintah UK melalui Tim UK PACT menawarkan bantuan kepada Pemda DIY untuk mendukung upaya menekan emisi karbon di DIY.

Penawaran yang diajukan dari UK salah satunya terkait dengan transportasi di DIY, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan angkutan umum. UK PACT sendiri adalah program kerja sama antara Inggris dengan negara-negara lain untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk mempercepat transisi negara-negara mitra ke pengembangan rendah karbon.

"Kalau bicara soal angkutan umum, PR pertama kita, bagaimana masyarakat mau menggunakan angkutan umum. Itu PR yang paling luar biasa, karena ke mana-mana di sini (Yogyakarta) itu mudah. Selain itu, belum adanya privilege bagi mereka yang menggunakan angkutan umum, sehingga angkutan umum masih di nomor duakan," kata Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti sesuai mendampingi Gubernur DIY bertemu Tim UK PACT.

Made mengungkapkan, penerapan contraflow penting dalam upaya memperbaiki sistem transportasi di DIY. Selain itu, adanya priority line dan integrated transit system juga dapat dilakukan agar mampu menunjang penggunaan angkutan umum, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik menggunakannya.

"Dalam hal ini, pihak Kraton Yog-



KR-Riyana Ekawati

Ni Made Dwipanti Indrayanti

yakarta juga dilibatkan, karena nantinya akan bersinggungan dengan pengembangan sumbu filosofi Yogyakarta. Ke depan tentunya kita berharap bisa terwujud low emission zone di DIY. Dan sebagai langkah awal, Tim UK PACT akan melakukan scoping atau penentuan ruang lingkup hingga Maret 2025 mendatang," paparnya.

Sementara itu

Perwakilan UK PACT, Puspita Galih menyatakan, tindakan yang ditawarkan oleh tim UK PACT sebagai langkah awal upaya menekan emisi karbon di DIY yaitu scoping. Studi tersebut akan dijalankan selama dua bulan ke depan untuk mengenali persoalan transportasi apa saja yang ada di DIY. Proses scoping itu juga untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY.

"Tadi kami diinformasikan, sudah cukup banyak studi maupun kajian yang dilakukan Pemda DIY. Jadi fokus pertama kami ialah apa yang selanjutnya bisa dilakukan dana pa yang bisa diimplementasikan namun tetap sesuai dengan budaya di Yogyakarta," ungkapnya.

Dikatakan Puspita, sesuai arahan Gubernur DIY, semua rencana yang akan dilakukan di DIY harus tetap memegang kearifan lokal. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada pemerintah UK, di mana apa yang akan dilakukan di DIY tidak bisa sama dengan apa yang dilakukan di daerah lain di Indonesia.

"Sebelum ini kami sudah disclaimer dulu kepada Pemerintah UK bahwa DIY memiliki keistimewaan sendiri, sehingga tentunya tidak sama dengan daerah lain di Indonesia. Tentu apa yang akan kami lakukan ke depan akan tetap menyesuaikan dengan budaya atau kultur DIY," imbuhnya. **(Ria)-f**

RAIH NILAI SEMPURNA

Yogya Kembali Sabet Kota Peduli HAM

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berhasil mempertahankan predikat sebagai kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada penilaian tahun 2024 lalu. Bahkan capaian nilai yang diraih Pemkot sangat sempurna yakni 100.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogya Rihari Wulandari, mengatakan capaian itu tidak lepas dari dukungan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Yogya yang telah memberikan data sesuai parameter penilaian. Menurutnya, ini menjadi bukti nyata sinergitas yang luar biasa antara perangkat daerah di Kota Yogya dalam melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik. Harapannya, nilai sempurna ini dapat terus dipertahankan dan untuk parameter yang belum maksimal, perlu ada pengumpulan data yang lebih lengkap agar ke depan nilainya semakin sempurna. Selain itu, perlu juga persamaan persepsi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dan HAM," ungkapnya, Kamis (30/1).

Capaian predikat kota peduli HAM yang disematkan Pemkot Yogya sudah disabet hingga dua belas kali. Salah satu parameter atas capaian tersebut ialah kesetaraan layanan yang diberikan oleh Pemkot Yogya sehingga mampu menjadi pijakan dalam pemenuhan hak masyarakat.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogya Saverius Vanny Noviadri, menam-

bahkan predikat kota peduli HAM ini juga menjadi wujud komitmen Pemkot Yogya dalam memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. "Penilaian untuk kabupaten/kota peduli HAM mencakup dua aspek yaitu hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan sepuluh indikator dan 120 kriteria penilaian, Pemkot Yogya berhasil menunjukkan kinerja terbaik di DIY," jelasnya.

Adapun indikator penilaian hak sipil dan politik mencakup hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, serta hak atas keberagaman dan pluralisme. Sementara aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik, perumahan layak, serta hak perempuan dan anak. Semua aspek ini didukung oleh data dari berbagai perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Lingkungan Hidup.

"Capaian ini menempatkan Pemkot Yogya dengan nilai tertinggi di DIY. Penghargaan kabupaten/kota peduli HAM 2024 menjadi bukti nyata bahwa sinergitas, data yang valid, serta komitmen bersama mampu membawa Kota Yogya mencapai tingkat terbaik dalam penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia," tandasnya. **(Dhi)-f**

SEMANGAT BERBAGI DI TAHUN BARU IMLEK 2025

BRI Peduli Salurkan Bantuan Sembako Bagi Warga di Tangerang dan Singkawang



KR-Istimewa

BRI Peduli yang menjadi payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mengambil peran dalam merayakan Tahun Baru Imlek 2025.

TANGERANG (KR) - Tahun Baru Imlek, yang juga dikenal sebagai Tahun Baru China atau Festival Musim Semi adalah perayaan tradisional masyarakat Tionghoa yang menandai dimulainya tahun baru dalam kalender lunar Tionghoa. Perayaan ini dipercaya membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di tahun yang baru.

Banyak cara dilakukan dalam memaknai Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025. BRI Peduli yang menjadi payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mengambil peran dalam merayakan Tahun Baru Imlek 2025 dengan semangat berbagi dan peduli kepada sesama, khususnya bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek 2025.

Kepedulian ini ditunjukkan dengan menyalurkan bantuan sembako sebanyak 2.000 paket sembako bagi masyarakat Tionghoa di Tangerang, Banten dan Singkawang, Kalimantan Barat. Secara khusus, penyaluran sembako bagi warga di Tangerang dilakukan di Kelenteng Tjo Su Bio, yang berlokasi di Kampung Kahuripan Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek merupakan bentuk kepedulian BRI dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di antara masyarakat.

la menegaskan bahwa BRI terus mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial BRI Peduli dalam bentuk penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

Catur pun berharap bantuan dapat meringankan beban masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga perayaan Tahun Baru Imlek 2025 kali ini dapat membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian untuk Masyarakat.

Di tempat berbeda, Alam Setiawan selaku Ketua Kelenteng Tjo Su Bio Tangerang mengungkapkan, Kelenteng Tjo Su Bio merupakan salah satu Kelenteng tua di wilayah Tangerang dan berdiri sejak 1948.



KR-Istimewa

Penyaluran sembako bagi warga di Tangerang dilakukan di Kelenteng Tjo Su Bio, yang berlokasi di Kampung Kahuripan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

Selain merupakan tempat ibadah atau kebaktian Umat Khonghucu, Kelenteng ini juga menjadi pusat kegiatan lainnya seperti Tarian Naga, Tarian Barongsai dan Kungfu. Saat ini Kelenteng Tjo Su Bio mampu menampung umat yang beribadat hingga 500 orang.

"Kami Sangat senang dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh BRI Peduli dalam perayaan Imlek kali ini. Harapannya agar program ini bisa terus berjalan, sehingga banyak masyarakat khususnya yang membutuhkan, dapat merayakan tahun baru Imlek dengan penuh kebahagiaan dan berkat", ungkapnya. (*)